

Asmadianto

Dosen Universitas Indonesia Timur

Achmad Nurmandi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: nurmandi_achmad@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2015.0039>

Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat

(Studi Kasus: Konflik Internal dan Keterpilihan Kader dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat 2014)

ABSTRACT

Conflicts on political parties is a routine phenomenon that occurred in Indonesia. This happens due to lack of awareness in organizing both the elite and party leaders in reducing conflict. Meanwhile, the Golkar Party is the party who placed second in the 2014 election yesterday, but Golkar did not choose/decide a candidate to be a President. Such conditions are the initial emergence of internal conflict in the Golkar party DPD West Sulawesi, where there is a view difference of cadres in the district against the direction of the coalition that was built under the leadership of the DPP handled by Aburizal Bakri. That difference led to the dismissal of Anwar Adnan Saleh, chairman of DPD Golkar Party of West Sulawesi. Based on the explanation above, while the issues raised in this study is: first, how far is the extent of the internal conflicts within the Golkar DPD of West Sulawesi, second, how is the relations of conflict with the election of cadres on the nomination of the head of the region in several districts in West Sulawesi. Meanwhile, the method used in this research is qualitative descriptive with the use of case studies (case studies) that intensively conducted, thorough and in-depth on organization, institution or certain symptoms. While data collection techniques that was used are observation: to observe the objective conditions in the field, interviewing actors involved in the internal conflict DPD Golkar Party and Documentation. The results showed that: first, the cause of the conflict is a result of the deactivation of DPD Golkar chairman by the board of DPP that involving protests by a number of cadres in the area over the dismissal. Secondly, the presence of Nurdin Halid as a Tasks Executor increasingly heat up the embryo of Internal conflicts in the party. Third, as a result of doing the dismissal by the board DPP to Anwar make part of other DPD to highlight and heat up the conflict because they think that the central committee does not consider the result of the dismissal, fourth, a split that occurred in the internal of Golkar Sulbar greatly affect the electability of cadres in the nomination due to conflict rushing in Golkar, thus forcing the heads of district administrators do the election of figure to win the elections. Not even a half-hearted to enforce Golkar to form a coalition with the bearer party of a candidate in one district in West Sulawesi.

Keywords: Internal Conflict and Political Recruitment

ABSTRAK

Konflik pada partai politik merupakan sebuah fenomena rutin yang terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran berlembaga dengan baik para elit dan pengurus partai dalam mereduksi konflik yang ada. Sementara itu, Partai Golkar adalah partai yang berada pada posisi kedua pemenang Pemilu 2014 kemarin, akan tetapi Golkar tidak memilih/memutuskan calon presiden. Kondisi demikian merupakan awal mencuatnya konflik di tubuh internal DPD partai Golkar Sulbar, dimana terjadinya perbedaan pandangan kader di daerah terhadap arah koalisi yang dibangun pengurus DPP dibawah kepemimpinan Aburizal Bakri. Perbedaan tersebut mengarahkan pada pemecatan Anwar Adnan Saleh selaku ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat. Berdasarkan penjelasan diatas, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, Sejuahmana terjadinya konflik didalam internal DPD I Partai Golkar

Sulawesi Barat kedua, Bagaimana relasi konflik dengan keterpilihan kader pada pencalonan kepala daerah di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat. Sementara itu, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan studi kasus (case studies) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu mengamati kondisi obyektif di lapangan, mewawancarai pelaku-pelaku yang terlibat dalam konflik internal DPD I Partai Golkar dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penyebab terjadinya konflik adalah akibat dilakukannya penonaktifan ketua DPD I Golkar oleh pengurus DPP yang melibatkan aksi protes sejumlah kader di daerah atas pemecatan itu. Kedua, kehadiran Nurdin Halid selaku Pelaksana Tugas (Plt) semakin memperpanas embrio konflik di Internal Partai. Ketiga, akibat dilakukannya pemecatan oleh pengurus DPP kepada Anwar membuat sebagian pengurus DPD lainnya ikut menyoroti dan memperpanas konflik karena menganggap pengurus pusat tidak mempertimbangkan akibat dari pemecatan tersebut keempat, perpecahan yang terjadi di internal Golkar Sulbar sangat berdampak pada elektabilitas kader dalam pencalonan kepala daerah dikarenakan kesibukan dalam menengarahi konflik Golkar, sehingga di beberapa daerah kabupaten memaksa pengurus melakukan penjarangan figur untuk memenangkan Pilkada. Bahkan tidak tanggung-tanggung memaksa Partai Golkar berkoalisi pada partai pengusung bakal Calon di salah satu kabupaten di Sulbar.

Kata Kunci : Konflik Internal dan Rekrutmen Politik

PENDAHULUAN

Partai Golkar yang diketuai oleh Aburizal Bakri, pada Pilpres 2014, melakukan koalisi ke partai politik pengusung Calon Presiden Prabowo-Hatta. Meskipun dalam pemilu 2014 Golkar mampu berada pada posisi kedua dalam perolehan kursi di parlemen. Golkar tidak memilih/memutuskan calon presiden. Kondisi demikian merupakan awal mencuatnya konflik di dalam tubuh internal partai Golkar, dimana terjadinya perbedaan pandangan kader di daerah terhadap arah koalisi yang dibangun. Perbedaan tersebut mengarahkan pada pemecatan sejumlah kader yang membelot dari instruksi partai. Pemecatan sejumlah kader tersebut, merupakan akibat dari mangkirnya kader yang tidak mengindahkan instruksi partai dalam mendukung koalisi dengan partai Gerindra.

Sementara konflik yang terjadi di DPP Golkar, berpengaruh terhadap perselisihan yang ada di DPD I Golkar Sulawesi Barat. Terjadinya pemecatan kader yang membelot dari instruksi partai merupakan awal munculnya konflik di internal DPD I Golkar Sulbar. Sehingga fokus utama penulis dalam penelitian ini adalah konflik di dalam internal Golkar Sulbar dengan sedikit menggambarkan keterkaitan isu nasional (Konflik DPP Golkar) untuk mempermudah telaah pembahasan penelitian. Sementara itu,

418 penulis akan menggambarkan yang menelatarbelakangi konflik yang terjadi didalam internal Golkar Sulbar terlepas dari peranan DPP melakukan pemecatan. Terjadinya dualisme kepemimpinan DPD diantara Kubu Anwar dan kehadiran Nurdin Halid selaku Plt ketua DPD I Golkar Sulbar. Hal tersebut kemudian menciptakan dinamika didalam internal Golkar akibat mendapat penolakan dari kader atas kehadiran Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di Sulbar. Konflik pun kian tak terelakan ketika kehadiran Nurdin juga mendapat penolakan dari sebagian kalangan pengurus DPD yang menganggap kehadiran Nurdin sebagai Plt ketua cacat mekanisme partai. Sedangkan secara terpisah Nurdin dengan keras mengingatkan kepada kader dan pengurus Golkar di Sulbar melalui mandat dari DPP bahwa keberadaannya sah secara hukum atas dirinya yang diamanatkan untuk memimpin sementara Golkar di Sulbar dengan menggantikan Anwar yang telah dipecat akibat melanggar instruksi partai. Oleh karena itu, konflik yang terjadi merupakan tantangan bagi Partai Golkar Sulbar untuk segera menyelesaikan, sebab hal tersebut akan menjadi ancaman terhadap kesiapan kader pilihan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada di sejumlah Kabupaten di Provinsi Sulbar. Sehingga, sejumlah problem penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan, (1) konflik yang terjadi di dalam internal Partai Golkar di Sulawesi Barat, (2) keterpilihan kader partai Golkar dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2015.

KERANGKA TEORI

Beberapa pendekatan akan digunakan dalam memahami dan menganalisa topik penelitian. Pertama, teori proses terjadinya konflik dan jenis-jenis konflik digunakan mengidentifikasi dan menjelaskan konflik yang terjadi di dalam internal DPD I Partai Golkar dalam menyikapi Pilpres 2014. Kedua, teori manajemen konflik digunakan untuk membantu menganalisa dan menjelaskan bagaimana model

pengelolaan konflik di dalam internal DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat dan Ketiga, teori rekrutmen politik digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana proses rekrutmen kader di dalam organisasi politik untuk disandingkan dalam kegiatan politik seperti Pemilu, Pilkada dan Pilpres, sehingga dengan hadirnya rekrutmen di dalam partai politik mampu menciptakan sumber daya manusia yang potensial dan tentunya sejalan dengan ideologis partai dengan kata lain, teori rekrutmen digunakan dan diperlukan untuk menganalisa proses keterpilihan kader di internal Partai Golkar Sulawesi Barat untuk dicalonkan pada Pemilu dan Pilkada.

PROSES TERJADINYA KONFLIK

Pada hakekatnya keberadaan konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan, dengan kata lain bahwa konflik selalu hadir dan tidak dapat dielakkan. Konflik sering muncul dan terjadi pada setiap organisasi, namun konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa ada sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu.

Hendricks, W. (1992) dalam Wahyudi (2011:19), mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari tiga tahap: pertama; peristiwa sehari-hari, kedua; adanya tantangan, sedangkan menurutnya yang ketiga adalah; timbulnya pertentangan. Dalam penjelasannya, peristiwa sehari-hari ditandai dengan adanya individu yang merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungannya. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Pada tahap kedua, apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Masing-masing anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan aturan organisasi. Kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan organisasi. Pertentangan merupakan proses terjadinya konflik tahap ketiga. Pada tahap ini masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan kohesivitas

420 kelompok dianggap lebih penting daripada kesatuan organisasi.

Menurut pandangan Hardjana, A. M.,(1994) dalam Wahyudi (2011:19), bahwa konflik setidaknya dalam proses terdapat kondisi yang mendahuluinya. Adapun lingkaran konflik yang dimaksudkan adalah berupa hal-hal sebagai berikut; (1) kondisi yang mendahului, (2) kemungkinan konflik yang dilihat, (3) kemungkinan konflik yang dirasa, (4) perilaku yang nampak, (5) konflik yang ditekan atau dikelola, (6) dampak konflik. Sedangkan Terry, G, R. (1986), menjelaskan bahwa konflik pada umumnya mengikuti pola yang teratur yang ditandai timbulnya suatu krisis, selanjutnya terjadi kesalahpahaman antar individu maupun kelompok, dan konfrontasi menjadi pusat perhatian, pada tahap berikutnya krisis dialihkan untuk diarahkan dan dikelola.

Pada saat permulaan muncul suatu krisis ditandai adanya pertentangan untuk memperebutkan sumber daya atau jabatan dalam sebuah organisasi, maupun disebabkan oleh lingkungan yang tidak kondusif. Selanjutnya muncul kesalahpahaman antar individu maupun kelompok dalam menafsirkan sasaran kelompok maupun tujuan organisasi secara keseluruhan. Pimpinan atau yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah di dalam internal organisasi yang mulai menaruh perhatian dan melakukan tindakan koreksi. Tahap berikutnya, suatu konfrontasi menjadi pusat perhatian para pimpinan tingkat menengah (*middle management*) untuk meneliti keluhan-keluhan anggota dalam organisasi dan dilakukan pembicaraan pembicaraan guna menyusun rencana yang bersifat tentatif untuk langkah penyelesaian yang bersifat menyeluruh. Kecenderungan konflik bergerak malalui tahapan tahapan tertentu, tetapi tidak selalu mengikuti pola-pola linier. Dengan demikian, konflik tidak statis tetapi dinamis dan melalui beberapa tahap.

Sedangkan Tosi, et al. (1990) dalam Wahyudi (2011:20), mencoba menggabungkan beberapa model proses konflik oleh beberapa para

pakar konflik sebelumnya sebagai berikut; Permulaan konflik (*antecedents of conflict*) merupakan kondisi-kondisi yang menyebabkan dan mendahului suatu peristiwa konflik. Peristiwa yang dapat mengawalimunculnya konflik adalah adanya kekecewaan (*frustration*). Kekecewaan tidak selalu diungkapkan secara terbuka dan biasanya gejala-gejala akan terjadinya konflik tidak dapat dilihat, Masing-masing individu atau kelompok berusaha menahan diri dan tidak bersifat reaktif. Pada tahap berikutnya, kedua belah pihak merasa adanya konflik (*perceived conflict*). Didalam internal sebuah organisasi tercipta suasana persaingan, tiap individu/kelompok cenderung untuk saling mengungguli dan bahkan berusaha untuk mengalahkan individu/kelompok lain. Keterbatasan sumberdaya organisasi (jabatan) menyebabkan individu atau kelompok saling berebut. Perilaku yang nampak (*manifest behavior*), pada situasi hubungan dalam organisasi sudah nampak peristiwa konflik. Individu ataupun kelompok menanggapi dan mengambil tindakan, bentuknya dapat secara lisan, saling mendiamkan, bertengkar, berdebat. Sedangkan tindakan nyata dalam perbuatan berupa persaingan, permusuhan atau bahkan dapat mengganggu kelompok lain sehingga mengancam kelangsungan organisasi. Pengelolaan konflik (*conflict resolution*), pimpinan bertanggung jawab terhadap pengelolaan konflik di dalam organisasi. Realitas menunjukkan bahwa konflik selalu hadir pada setiap organisasi dan keberadaan konflik tidak dapat dihindarkan. Tugas pimpinan adalah mengarahkan dan mengelola konflik agar tetap produktif, meningkatkan kreativitas anggota guna menjaga kelangsungan organisasi. Dampak konflik (*conflict effect/ conflict impact*), konflik yang tidak dapat dikelola secara baik menyebabkan kedua belah pihak yang terlibat konflik menjadi tidak harmonis di dalam organisasi.

JENIS-JENIS KONFLIK

Dalam aktivitas organisasi, dijumpai bermacam-macam konflik

yang melibatkan individu-individu maupun kelompok-kelompok. Beberapa kejadian konflik telah diidentifikasi menurut jenis dan macamnya oleh Polak, M. (1982) dalam Wahyudi (2011:30) membedakan konflik menjadi 4 jenis yaitu, (1) konflik antar kelompok, (2) konflik intern dalam kelompok, (3) konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekuasaan, dan (4) konflik intern individu untuk mencapai cita-cita.

Sementara itu, Cummings (1980) dalam Wahyudi (2011:32) mengidentifikasi jenis-jenis konflik dalam organisasi dan oleh penulis di inpresentasikan dalam organisasi politik (partai politik) yaitu; konflik di tingkatan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), konflik antar Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan konflik pimpinan perorangan dengan partai politik. Konflik tidak terbatas pada anggota organisasi tingkat pelaksana akan tetapi terjadi juga pada tingkatan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Konflik antar pimpinan berkaitan dengan pelanggaran batas wilayah kerja dan kekuasaan. Masalah lain yang menjadi persolan antar pimpinan adalah kurangnya kerja sama dan tidak terpelihara saling pengertian diantara kedua pihak. Sedangkan konflik pimpinan perorangan dengan organisasi disebabkan organisasi membatasi inisiatif, kreativitas, dan gagasan yang muncul dari para pimpinan karena dianggap tidak sesuai dengan program yang direncanakan.

Pada umumnya konflik di dalam tubuh partai politik disebabkan oleh hal yang relatif tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beberapa jenis konflik di dalam partai politik yang sering mencuat di media massa menurut Lili Romli et al. (2008:28) diantaranya adalah konflik antar faksi, konflik pada kongres partai (cabang, daerah/wilayah dan nasional), konflik personal antar pengurus dan konflik antar tingkat pengurusan (vertikal), ataupun konflik antar pengurus pada tingkat yang sama atau antar sayap

partai (horizontal).

A. KONFLIK ANTAR PENGURUS

Konflik personal antar pengurus di dalam partai politik menyebabkan atmosfir yang tidak baik bagi pelaksanaan roda organisasi partai. Konflik personal sering didasari pada kekuasaan atas sumber daya yang tidak seimbang antar satu orang dengan yang lain di dalam partai, yang biasanya menyangkut ekonomi dan kekuasaan. Konflik personal ini menjadi subur di tengah budaya patronase yang masih begitu kental dalam praktek pengorganisasian partai. Patronase menjadi dasar pembentukan faksi di dalam partai politik itu sendiri. Faksionalisasi di tubuh partai politik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Secara sederhana, faksi dalam partai politik dapat didefinisikan sebagai pengelompokan orang di dalam partai yang berkompetisi untuk memperoleh keuntungan kekuasaan di dalam partai (Randal dan Savasand, 2002:20, dalam Lili Romli et.al., 2008:28).

B. KONFLIK KELEMBAGAAN

Konflik kelembagaan ini sering muncul dengan menggunakan legitimasi kepengurusan yang satu atas yang lainnya. Misalnya, DPP melakukan pembekuan kepengurusan DPD, DPD melakukan pembekuan kepengurusan atas DPC dan seterusnya. Jika pembekuan itu didasari oleh perbuatan melawan hukum, atau pelanggaran AD/ART kepartaian itu masih bisa ditolerir. Namun, tidak jarang alasan pembekuan tidak memiliki dasar yang kuat sehingga terasa janggal atau subjektif dan kemudian memunculkan protes dari pengurus di tingkat yang lebih rendah. Salah satu penyebab konflik semacam ini muncul dari adanya ketetapan yang berbeda dari pengurus daerah dengan penetapan calon yang disahkan oleh pengurus pusat sementara pengurus daerah sudah melakukan prosedur pemilihan yang terbuka dari bawah (Lili Romli et al., 2008:29).

C. KONFLIK SUKSESI KEPEMIMPINAN

Biasanya konflik terjadi dalam suksesi kepemimpinan partai dalam forum Muktamar/Munas/Kongres karena dalam pelaksanaannya dianggap tidak demokratis, direkayasa oleh sekelompok elit partai, adanya money politics, tidak berdasarkan tata tertib yang di sesuai dengan AD/ART partai yang bersangkutan. Selain itu juga, konflik terjadi dalam suksesi kepemimpinan kerap muncul karena di antara orang-orang atau kelompok yang ingin maju dalam kepemimpinan partai tidak saling mengakomodir satu sama lain. Tradisi perbedaan yang tertata dalam bingkai semangat konsensus tampaknya belum melembaga di antara elit-elit partai, sehingga yang nampak di antara mereka adalah berupa manuver-manuver untuk saling menjatuhkan kompetitor, bukan kompetisi yang fair di antara mereka (Lili Romli, et al., 2008:31).

KONSEP MANAJEMEN KONFLIK (PENGELOLAAN KONFLIK)

Tosi et al., dalam wahyudi (2011:47) mengartikan manajemen konflik dalam organisasi menjadi tanggung jawab pimpinan (manajer) baik pimpinan tingkat lini (supervisor), tingkat menengah (middle manajer), dan pimpinan tingkat atas (top manajer), maka diperlukan peran aktif dalam untuk mengarahkan situasi konflik agar tetap produktif. Selanjutnya, dalam manajemen konflik (pengelolaan konflik) dikenal dengan istilah Rekonsiliasi, Arbitrasi, dan Transformasi elemen konflik.

- a. Rekonsiliasi merupakan proses resolusi konflik yang mengubah konflik menjadi damai. Dimana terdapat kesadaran kedua pihak bahwa konflik yang berlarut-larut akan memakan biaya lebih banyak dan sia-sia. Faktor masa lalu menjadi vital untuk mengetahui akar konflik yang digunakan untuk menghilangkan potensi konflik dan menjalin hubungan yang lebih harmonis pada waktu yang mendatang (Whittaker, 1999:8).
- b. Menurut Christopher A. Moore (2003) dalam Wirawan

(2013:214), arbitrase merupakan istilah umum proses penyelesaian konflik sukarela di mana pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang imparial (tidak memihak) dan netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik. Keluaran dari keputusan arbitrase bisa bersifat nasihat dan tidak mengikat atau bisa juga berupa keputusan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik.

c. Transformasi elemen konflik.

Elemen konflik adalah semua faktor dari konflik yang meliputi antara lain: penyebab konflik, gaya manajemen konflik, kekuasaan yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dan sebagainya. Persepsi pihak yang terlibat konflik mengenai elemen-elemen konflik ini berbeda sehingga konflik bisa berlangsung secara berkepanjangan. Elemen-elemen tersebut perlu ditransformasikan sehingga pihak yang terlibat konflik mempunyai persepsi yang sama atau paling tidak saling mendekati (Wirawan, 2013:210).

REKRUTMEN POLITIK

Defenisi rekrutmen politik sendiri oleh sebagian para Ahli; Ramlan Surbakti misalnya, mendefinisikan rekrutmen sebagai proses seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Ramlan Surbakti, 2010:150).

Sedangkan Syamsuddin Haris memberikan dua cara dalam seleksi para calon yaitu pertama, seleksi dilakukan oleh atau kerja sama dengan suatu Tim seleksi yang dibentuk oleh partai. Kedua, seleksi dilakukan melalui struktur dan mekanisme yang ada dalam partai sendiri (Syamsuddin 2005:183).

Dalam mendapatkan mendapatkan sumber daya yang baik dan

426 potensial dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala Daerah atau pemilu maka partai politik diharapkan melakukan sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dalam sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi dalam memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya. Berikut Gambar, Bagan metode rekrutmen dari Firmanzah (2011:72):



Menurut Lili Romli dkk., (2008:19) dalam partai politik, ada beberapa permasalahan yang umumnya dialami partai-partai politik di Indonesia saat ini. Pertama, Partai belum memiliki prosedur rekrutmen yang mapan, baik dalam tataran konsep maupun dalam implementasinya. Persoalan inilah yang menelatarbelakangi sebagian partai untuk melakukan rekrutmen politik yang bersifat instan, antara lain dengan memasukkan kalangan tertentu, khususnya public figure pejabat atau mantan pejabat, dan kalangan pengusaha sebagai anggota, pengurus, dan bahkan calon anggota legislatif dan eksekutif tanpa kriteria dan prosedur yang jelas. Kedua, partai masih terlalu mengandalkan model rekrutmen konvensional, terutama bergantung pada basis dukungan lama, yang sering telah mengalami pergeseran. Ini menyebabkan partai relatif pasif dan kurang inovatif dalam mengeksploratif pendekatan yang lebih efektif dalam menjaga dan memperluas basis pendukung. Salah satu contoh dampak dari situasi ini adalah kesulitan partai dalam merekrut kalangan muda berkualitas untuk menjadi anggota dan aktifis partai. Ketiga,

rekrutmen kandidat di internal partai untuk maju dalam pemilihan umum kurang memperhatikan aspek kinerja dari bakal calon. Selama ini proses seleksi kandidat sering mengesampingkan pertimbangan terhadap kapasitas, integritas, pengalaman, dan penugasan yang dimiliki bakal calon. Kebijakan insentif dan disinsentif bagi anggota belum konsisten dan transparan. Kedekatan dengan pimpinan partai biasanya menjadi faktor yang lebih menentukan. Akibat dari kecenderungan oligarkis ini adalah tersisihnya anggota partai yang lebih dulu bergabung dan telah memberikan kontribusi kepada partai.

Secara umum ada beberapa permasalahan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia menurut Lili Romli dkk., (2008) di atas yaitu, rekrutmen yang instan, bersifat pasif dan sulit menarik kaum muda, adanya kecenderungan oligarki, dan lemahnya manajemen data keanggotaan.

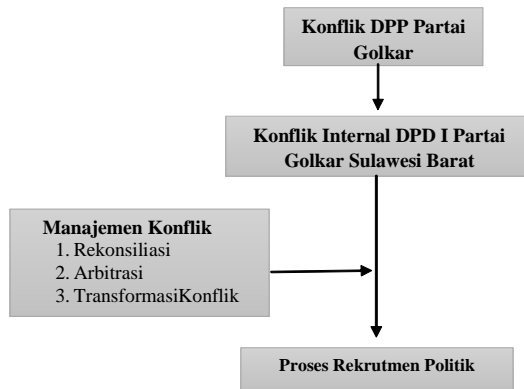
METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus` (case studies). Pengertian studi kasus (case studies) menurut Suharsimi (2002:120) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Secara umum pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengamati, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi dilapangan. Dengan melakukan metode ini diharapkan penulis mampu mengembangkan penelitian dan mengetahui secara mendalam, sejauh mana mengungkapkan permasalahan tersebut dengan mendeskripsikan secara jelas dan faktual sesuai dengan data-data yang diperoleh dilapangan. Sementara sumber perolehan data berdasarkan data primer dan data sekunder.

428 PEMBAHASAN

Dalam Bab Pembahasan ini akan diuraikan dan dijelaskan sejumlah temuan-temuan dilapangan seputar rangkaian terjadinya Dinamika Konflik Internal DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat menjelang Pilpres 2014 yang kemudian berakhir dengan pemberhentian Ketua Umum DPD I Partai Golkar Sulbar oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakri, serta di mandatkannya Nurdin Halid selaku Pelaksana Tugas (Plt) ketua yang merupakan awal pemicu terjadinya konflik di internal Golkar Sulbar karena menuai protes dari sebagaian kader di Sulbar. Diuraikan juga keterpilihan kader dalam menghadapi suksesi Pilkada dan Pemilu di sulawesi barat. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait penulisan Tesis ini.

Berikut Gambar ilustrasi alur konflik didalam internal DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat:



KONFLIK DPP GOLKAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP INTERNAL DPD I SULAWESI BARAT

Konflik yang terjadi di DPP Golkar, berpengaruh terhadap perselisihan yang ada di daerah. Terjadinya pemecatan kader yang membelot dari instruksi partai merupakan awal munculnya konflik di internal DPD I Golkar Sulbar. Adanya pemberhentian/pemecatan oleh Ketua Umum Golkar (Aburizal Bakri) terhadap Anwar Adnan

Saleh selaku Ketua DPD I Golkar Sulawesi Barat karena tidak mengindahkan instruksi partai dan menunjuk Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Akibat dari pemecatan ini membuat kader Golkar di Sulbar melakukan perlawanan dan aksi demo menolak adanya keputusan Ketua DPP Golkar tersebut menurutnya, pemberhentian saudara Anwar Adnan Saleh selaku Ketua DPD I Golkar dan penunjukan Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) adalah keputusan sepihak dan cacat konstitusi.

Berikut kutipan wawancara penulis terhadap Muhammad Amril selaku Koordinator Komite Aksi Kader Muda Penyelamat DPD Partai Golkar Sulbar:

"Kemarin kami memang mengharamkan Nurdin Halid bertandang ke Sulbar karena kehadirannya bisa mencederai sendi-sendi demokrasi di tubuh partai Golkar, buktinya selama ini kehadirannya membuat perselisihan kader di daerah terutama di Sulawesi dan nyatanya di Sulbar kader masih mendukung penuh kepemimpinan Anwar Adnan Saleh dan menganggap masih legitimate yang sah karena pada waktu itu belum ada pemberhentian resmi dari DPP Golkar,"(Wawancara dilakukakan di Mamuju, Kamis, 25/06/2015).

Kutipan wawancara tersebut di atas menyiratkan beberapa hal penting yang menyebabkan awal terjadinya perpecahan di internal Golkar. Pertama, adalah bahwa adanya pemberhentian sepihak oleh DPP Pusat Golkar terhadap saudara Anwar Adnan Saleh selaku Ketua Umum yang tidak melibatkan jajaran pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi barat, dianggap cacat mekanisme. Kedua, kehadiran Nurdin Halid sebagai rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar untuk Pelaksana Tugas DPD I Golkar Sulawesi Barat dianggap sebagai keputusan sepihak karena tidak sesuai mekanisme partai dengan melibatkan pengurus DPD I Golkar di Sulawesi Barat. Memang disadari benar bahwa pemberhentian saudara Anwar selaku Ketua Umum Partai Golkar di Sulawesi Barat menjadi babak baru dalam memperpanas embrio konflik di internal partai yang

430 berlambang beringin tersebut, mengingat Anwar adalah kader terbaik dengan memenangkan dirinya dalam pertarungan politik Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat dua periode berturut-turut dan memenangkan kader Partai Golkar yang diusungnya dalam kontestasi Pilkada di beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat seperti Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara. Kemenangan ini tidak lepas dari campur tangan beliau sebagai Ketua Partai. Hal ini kemudian menjadi alasan penolakan dan tuntutan aksi demonstrasi para kader Golkar di Sulawesi Barat terhadap pemberhentian sepihak tersebut.

Lebih lanjut, penolakan juga diutarakan oleh Ketua Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) Mamuju, menilai isu adanya pemecatan H. Anwar Adnan Saleh sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I partai Golkar Sulbar penuh dengan kejanggalan serta bernilai inkonstitusional. Menurutnya, banyak kejanggalan dalam proses pemecatan yang dilakukan DPP terhadap ketua DPD I Golkar, salah satunya adalah belum adanya surat teguran sebanyak tiga kali dan surat pemanggilan terkait tuduhan atas pelanggaran tidak mengindahkan instruksi partai.

Berikut wawancara terhadap saudara Amri Marrui, selaku Ketua AMPG Golkar Mamuju:

"Sebenarnya hal ini pernah saya tuturkan sebelumnya di media bahwa banyak kejanggalan dalam proses isu pemecatan tersebut. Seandainya surat teguran dan surat pemanggilan tidak di indahkan sebanyak tiga kali maka DPP berhak memecat, tapi ingat DPP juga harus menyampaikan secara fakta dalam tuduhannya,"(Wawancara dilakukan di Mamuju, Sabtu/20/06/2015).

Kepemimpinan Anwar dinilai sangat berpengaruh terhadap popularitas Partai Golkar, sehingga mendapat dukungan positif dari para kader di daerah. Hal ini menyebabkan munculnya benturan yang cukup tajam manakala keputusan sepihak yang dilakukan pengurus tingkat pusat. Sehingga perlu adanya pertimbangan dan

koordinasi yang baik agar menghindari pertumbuhan konflik di dalam internal partai.

431

Pertimbangan dimaksudkan, mengingat kontestasi Pemilu yang akan dihadapi kedepan, yakni terkait Pilkada serentak yang akan berlangsung di bulan September 2015. Hal ini kemudian menjadi ancaman terhadap kader partai yang akan diusung dalam pesta demokrasi tersebut, mengingat adanya permasalahan di internal partai. Sehingga sebuah keharusan untuk menata kembali internal partai dari permasalahan yang dihadapi, agar Partai Golkar tetap survive dan mengulang kembali kemenangan pada Pilkada di beberapa wilayah kabupaten yang memang menjadi kantong basis kekuatan Golkar.

Selanjutnya, Anwar yang punya kedekatan baik dengan Jusuf Kalla membuat dirinya harus diberhentikan oleh partai karena dianggap mengkhianati instruksi partai dalam mendukung arah koalisi yang dibangun terhadap salah satu pasangan calon Presiden Prabowo- Hatta. Hal ini kemudian berlanjut pada perselisihan didalam internal DPD Golkar Sulbar manakala kehadiran Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas menjadi ancaman bagi kepengurusan Anwar di Golkar dan menjadi titik awal perselisihan akibat arah koalisi yang dibangun. Diakui, Anwar dan Jusuf Kalla adalah kader dan Politisi Partai Golkar yang sama-sama dari Sulawesi dan mempunyai kerjasama dalam dunia bisnis sehingga kedekatan ini yang membuat dirinya sukar menolak kehadiran Pasangan Calon Presiden Jokowi-Jusuf Kalla dalam melakukan kampanye politik. Namun pengakuan yang berbeda oleh Anwar diberbagai media bahwa dirinya hadir dalam kampanye politik Jokowi-JK semata-mata dirinya selaku Gubernur dan bukan berarti mengkhianati instruksi Partai.(Sumber: Metrotv.com)

Sementara itu, konflik kian menunjukkan perselisihan didalam internal partai manakala Nurdin Halid dalam pernyataannya memperjelas kesalahan Anwar dengan dikeluarkannya SK

432 pemecatan dan mengakui dirinya di depan publik bahwa kepengurusan Golkar Sulbar menjadi tanggung jawab dirinya berdasarkan mandat dari Ketua DPP Golkar. Kondisi demikian semakin sulit untuk membendung perpecahan didalam internal partai dimana kondisi dan tempat yang berbeda dilakukannya aksi demonstrasi oleh kubu simpatisan Anwar dalam menolak pemecatan Anwar dan menganggap Nurdin sebagai biang keladi dari pemecatan tersebut karena disinyalir ada kepentingan untuk menguasai kepengurusan Partai Golkar di Sulbar.

Dukungan Anwar terhadap Jusuf Kalla menjadi alasan tersendiri bagi Nurdin untuk melakukan sosialisasi kepada kader didaerah bahwa Anwar dipecat dari jabatannya karena melanggar arah koalisi partai yang telah dibentuk ditingkat Pusat sehingga hal ini menjadi polemik ditingkat pengurus internal DPD I Golkar Sulbar karena menganggap adanya kejanggalan dalam pemecatan dan inkonstitusional pengangkatan Nurdin selaku Plt Ketua Partai.

Kondisi demikian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan tentang arah koalisi yang dibangun di tingkat pusat tidak hanya menyebabkan konflik di tingkat pengurus DPP tetapi juga berpengaruh terhadap perpecahan yang terjadi di internal DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat. Hal ini terlihat dengan dilakukannya pemecatan kepada saudara Anwar selaku Ketua Partai oleh Aburizal Bakri (Ketua DPP) yang kemudian berkembang menjadi perpecahan di internal Pengurus Golkar Sulbar.

KONFLIK INTERNAL DPD I PARTAI GOLKAR SULAWESI BARAT

A. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK

Berdasarkan deskripsi alur terjadinya konflik internal Partai Golkar Sulbar diatas adalah titik awal mencuatnya konflik, dimana terjadi perpindahan elit Partai Golkar, yaitu; Suhardi Duka yang sedang menjabat sekretaris DPD I Golkar hijrah ke Partai Demokrat.

Selanjutnya, konflik yang berbeda terjadi di internal Partai Golkar dengan adanya pemberhentian Anwar Adnan Saleh selaku Ketua DPD I Golkar Sulawesi Barat dan pemberian rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) oleh DPP Golkar kepada Nurdin Halid. Yang mana penempatan Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tersebut menuai protes dan penolakan dari kader partai di daerah.

1) Hengkangnya Kader Partai

Sebelum terjadinya konflik internal Partai Golkar di Sulawesi Barat, juga sudah ada perpecahan di internal Pengurus yang mana munculnya rasa kekecewaan dari kader potensial Partai Golkar yaitu, H. Suhardi Duka terhadap pengurus DPD lainnya. Mundurnya Suhardi Duka dari kepengurusan Partai Golkar membuat Perpecahan di internal Partai Golkar Sulawesi Barat (Sulbar) perlahan makin terkuak dan menciptakan berbagai pandangan terhadap masyarakat.

Perseteteruan gerbong politik internal Partai Golkar Sulbar di gerbong Anwar Adnan Saleh (AAS) yang juga sebagai Gubernur Sulbar dan Suhardi Duka (SDK) selaku Bupati Mamuju Sulbar pun ramai diperbincangkan. Klimaks dari persetujuan internal Partai Golkar Sulbar ini terjadi semenjak Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulbar (Suhardi Duka), secara resmi menyatakan mundur dari partai yang selama 25 tahun menjadi kendaraan politiknya untuk mendapatkan kekuasaan.

Mundurnya Suhardi Duka dari kepengurusan Partai Golkar di Sulawesi Barat disinyalir adanya komitmen politik yang dilanggar oleh rekan pengurus DPD Golkar dengan dirinya sehingga membuatnya hengkang dari partai yang telah membesarkan namanya di provinsi Sulawesi Barat tersebut, secara substansif terjadinya konflik di internal Partai Golkar disebabkan adanya ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya sehingga perbedaan pandangan yang "egois" mengakibatkan perpecahan yang tak terelakkan. Hal

semacam ini yang kemudian membuat kader partai yang sudah sejak lama berada dalam partai pun beralih ideologi politiknya atau beralih ke partai lain, akibat tidak adanya titik temu pandangan atau ideologi yang sama.

Sementara itu, perpecahan dan munculnya faksi-faksi di tubuh DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat menjadi alasan hengkangnya Suhardi Duka dari Partai tersebut menurutnya, ada potensi konflik dan munculnya faksi-faksi akibat kehadirannya di Golkar maka untuk menjaga agar Partai Golkar tetap solid dan mekanisme partai tetap berjalan dengan baik serta pemerintahan kian efektif menyatakan dirinya untuk mundur dari kepengurusan Partai Golkar tersebut.

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Suhardi Duka:

"Seperti yang saya pernah sampaikan kepada media pada waktu itu bahwa saya mundur dengan alasan agar di Golkar tidak muncul faksi-faksi. Karena selama ini ia merasa ada faksi-faksi di Golkar akibat kehadirannya. "Dengan demikian, setelah saya mundur faksi-faksi itu jangan lagi ada dan Itu sebabnya konflik ini harus dimanage agar lebih dinamis. Salah satu caranya agar tetap dinamis, saya harus mengalah supaya tidak ada lagi yang merasa terhalangi kalau saya masih di sana. Nantinya akan kemana? Itu persoalan kedepan. Saya tak khawatir, karena saya berteman dengan banyak partai. Sejak dulu saya dicalonkan oleh banyak partai. Saya keluar bukan untuk melawan atau menghabisi seseorang, tapi saya tidak ingin ada perpecahan. (wawancara dilakukan di Mamuju rabu, 20/5/2015)".

Di pihak lain Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh, membantah keras tudingan adanya perpecahan di partai berlambang pohon beringin itu. Menurutnya, sesuatu yang lumrah jika ada kader partai yang mundur dan memilih mencari partai lain dan tidak ada perpecahan maupun faksi-faksi yang terjadi di Partai Golkar Sulbar.

Berikut kutipan wawancara penulis terhadap Anwar Husein

selaku anggota DPRD Kab. Mamuju dari Fraksi Golkar juga keluarga dekat Pak Gubernur.

"Seperti yang pernah dikatakan Pak Ketua (H. Anwar Adnan Saleh) sebelumnya di koran Tribun Timur, bahwa tidak ada perpecahan maupun faksi-faksi yang terjadi di Partai Golkar Sulbar. Segala proses yang menjadi keputusan partai tidak pernah dilakukan secara sepihak dan tetap melibatkan seluruh pengurus partai, dan yang dikatakan Pak Bupati (Suhardi Duka) itu hanyalah keinginan beliau untuk berpindah ke partai Demokrat karena momentum untuk meraih dukungan dan kendaraan politik 01 sulbar di 2016". (wawancara dilakukan di Kalukku, sabtu, 6/6/2015).

Dari pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwa terjadi perpecahan di internal Partai Golkar yang melibatkan Suhardi Duka dengan pengurus DPD Golkar Sulbar, hanya karena komitmen politik dalam meraih dukungan untuk momentum Pilkada Gubernur 2016.

2) Kekalahan Partai Golkar Pada Pileg Provinsi Sul-Bar 2014

Terlepas dari kondisi politik yang menjadi ancaman perkembangan masa depan partai, tantangan lain yang dihadapi Partai Golkar adalah kekalahan dalam pemilu kemarin. Hal itu terjadi karena tidak tercapainya target pada pemilu (2014) yang menargetkan empat kursi atau dua kursi di setiap daerah pemilihan di Kabupaten Polman untuk kursi DPRD Provinsi Sulbar. Sementara, perolehan kursi pada pemilu sebelumnya (2009) mampu meraih 13 kursi dan berkurang menjadi 9 kursi pada pemilu 2014 kemarin.

Sebagai pimpinan partai, diakui Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Barat bahwa tidak tercapainya target di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Pemilu Legislatif 2014 kemarin, disebabkan adanya permasalahan di internal DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat.

Berikut kutipan wawancara terhadap Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar:

"Jumlah kursi yang diraih Golkar di Polman itu, membuat perolehan suara Golkar di Pemilu 2014 berkurang dari 13 kursi di Pemilu 2009 menjadi sembilan kursi di Pemilu 2014, hal itu terjadi karena ada masalah di internal partai Golkar yang akan dijadikan evaluasi ke depannya. "Memang ada masalah internal. Itulah kelemahan partai Golkar di Pemilu ini, dan akan dijadikan evaluasi agar Golkar tetap bisa memenangkan setiap momentum politik ke depannya"(Wawancara diperoleh pada hari Minggu, 1/3/2015 di Mamuju.)

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai kekalahan dalam pemilu yang tidak mencapai target perolehan kursi di legislatif, dikarenakan adanya permasalahan internal yang menjadi penyebab kekalahan. Sementara permasalahan yang dimaksud adalah kurangnya kerjasama dengan mementingkan berjuang sendiri-sendiri oleh kader yang ikut dalam Caleg pada pemilu kemarin sehingga berimplikasi kepada penurunan perolehan suara di beberapa titik basis kekuatan Golkar di Kabupaten Polewali Mandar dan harus puas dengan perolehan satu (1) kursi masing-masing Dapil. Maka dapat dipastikan kekalahan ini menjadi pengalaman awal Partai Golkar sepanjang sejarah pemilu di Sulawesi Barat, sehingga dituntut untuk menata kembali kekuatan, strategi politik dan membangun konsolidasi dalam menghadapi moment penting kedepan.

3) Pemecatan Kader

Adanya perbedaan pandangan kader, membuat Pengurus DPP Golkar melakukan pemecatan sejumlah kader di daerah yang tidak mengindahkan instruksi partai. Pemecatan ini, menjadi titik awal mencuatnya konflik di internal DPD I Golkar, dimana ketua Umum Partai Golkar Sulawesi Barat disinyalir mengkampanyekan Jokowi-JK pada Pilpres kemarin di Sulawesi Barat, maka Anwar Adnan Saleh

dipecat dari jabatannya selaku Ketua DPD I Golkar. Keputusan atas pemecatan tersebut ditandai dengan penunjukan Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Penunjukan sementara dilakukan sampai menunggu (Musdalub) dilaksanakan untuk pemilihan Ketua secara resmi. Hal ini dikatakan oleh Mahyudin selaku pengurus pusat Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar. Menurutnya, pemecatan dilakukan sebagai tindak tegas terhadap kader yang membelot dari instruksi partai.

Berikut kutipan wawancara Bapak Mahyudin selaku Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar kepada salah satu media di Jakarta, lihat JPNN.com, Kamis (19/6/2014).

"Seperti diketahui, Partai Golkar sudah memberikan dukungannya kepada pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa di Pilres 2014. Pemecatan dilakukan terhadap Ketua DPD Golkar Sulbar atas nama Anwar Adnan Saleh karena mengkampanyekan pasangan nomor urut 2. Rapat dilakukan tim khusus DPP Golkar jam 3 sore (Kamis, 19 Juni). Terkait surat pemecatan, jelas Mahyuddin, kemungkinan baru akan dibuat Jumat (20/6) hari ini. Namun Mahyuddin memastikan untuk sementara jabatan Ketua DPD Golkar Sulbar dipegang Nurdin Halid". (Mahyuddin, kepada JPNN.Com, Kamis 19/6/2014, diambil 24 Juni 2015).

Sejalan dengan pernyataan diatas menjadi sebuah legitimasi hukum setiap partai politik untuk menindak tegas kader yang tidak sejalan dengan garis ideologi atau kebijakan partai. Sebagaimana yang dijelaskan para ahli mengenai partai politik bahwa partai dibentuk untuk menyatukan orang-orang yang memiliki ideologi yang sama untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran...., (Kencana dkk, 2002:58). Secara konseptual, konflik lahir dari ketidaksesuaian cara pandang dan perilaku. Kondisi demikian dapat memecah persatuan kader, manakala cara pandang atau ideologi yang seharusnya menjadi pedoman nilai dalam melakukan program dan aktifitas kerja politik,

438 tidak lagi menjadi perhatian kader untuk menyatukan pendapat dan tujuan bersama.

Hal demikian terjadi didalam internal Partai Golkar, yang oleh pengurus pusat membuat keputusan poros koalisi dengan mendukung pasangan Prabowo-Hatta tanpa memperhatikan aspirasi dari pengurus tingkat bawah. Sehingga perpecahanpun tak terelakkan, akibatnya sikap otokrat Ketua Umum sebagai legitimasi kekuasaan yang tertinggi memecat beberapa kader yang membelot dari instruksi partai. Karena dianggap membelot dari instruksi partai, maka Anwar Adnan Saleh dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat.

Sementara itu, Anwar Adnan Saleh yang dipecat dari jabatannya, mengaku tidak menerima penonaktifan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Barat, dan tidak menerima tuduhan bahwa dirinya tidak mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Radjasa pada Pilpres 2014. Menurutnya, dugaan adanya penonaktifan tersebut terkait dengan kiprahnya menyambut kedatangan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Sulbar. Namun, Anwar menegaskan bahwa penyambutan tersebut kapasitas sebagai Gubernur dan bukan sebagai bentuk dukungan politik. (Baca; Jakarta, Kompas.Com., 24 juni 2014).

Meski penolakan pemecatan atas Anwar terpublikasi diberbagai media massa baik lokal maupun nasional, oleh kader Golkar H. Damris yang juga selaku Anggota DPRD Provinsi Sulbar dari Fraksi Partai Golkar, membenarkan adanya pemecatan yang dilakukan ketua umum partai terhadap ketua DPD I Golkar Sulbar.

Berikut wawancara penulis terhadap Bapak H. Damris S.Pd:

"Memang benar adanya pemecatan yang dilakukan Aburizal selaku ketua partai. Namun pemecatan tersebut, sudah dilakukan klarifikasi oleh Pak Anwar terkait tuduhannya yang tidak benar kepengurus tingkat pusat dan atas klarifikasinya beliau mendapatkan respon positif dari

Ketua DPP Golkar, dengan menjanjikan pencabutan surat pemecatan itu dalam tempo tiga hari kedepan, akan tetapi surat pencabutan itu tidak dilakukan dalam tempo yang dijanjikan. Sehingga yang terjadi adalah menguatnya kohesifitas konflik diantara pengurus, dan disinyalir ada pengurus internal DPP yang tidak menyukai kepengurusan Pak Anwar di Sulbar, bahkan pengurus tersebut ingin menguasai kepengurusan Partai Golkar di Sulawesi. Akibatnya, dikeluarkannya secara resmi surat pemecatan pak Anwar oleh Ketua DPP Golkar, (Wawancara dilakukan di mamuju, rabu 25 february 2015.)

Kondisi demikian diatas, sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu kader Golkar di Sulbar tersebut, semakin memperpanas situasi didalam internal Partai Golkar di Sulbar. Hal ini berujung pada perlawanan pengurus didaerah, dimana menuai reaksi dari kalangan kader pendukung Anwar yang menolak keputusan DPP tersebut, sehingga dipihak yang sama Aburizal Bakri, selaku pimpinan tertinggi partai melakukan pemecatan secara resmi.

Selanjutnya, pemecatan Anwar secara resmi dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) perubahan kepengurusan baru DPD I Golkar, yaitu; No:KEP-347/DPP/GOLKAR/IX/2014, tertanggal 25 september 2014. Dalam surat keputusan (SK) perubahan komposisi pengurus, Nurdin Halid ditunjuk sebagai Pelaksan Tugas (Plt) Ketua DPD I dan penunjukan Hj. St. Muhyina Muin sebagai Ketua Harian Golkar Sulawesi Barat. Keputusan Aburizal selaku Ketua DPP Golkar, tidak hanya menempatkan Nurdin Halid selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Partai tetapi juga menempatkan St. Muhyina Muin sebagai Ketua Harian Partai yang sebelumnya tidak masuk dalam jajaran pengurus.

4) Konflik Kelembagaan

Berdasarkan uraian sebelumnya diatas, dapat dipahami bahwa besarnya kewenangan yang dimiliki pengurus DPP sebagai pimpinan tertinggi partai. Maka dengan legitimasi yang lebih tinggi tersebut,

DPP dapat melakukan pembekuan pada kepengurusan tingkat bawah, seperti melakukan pemecatan terhadap sejumlah kader di daerah atau pengurus yang dianggap melakukan pelanggaran partai. Hal demikian terjadi, pada pengurus DPP Golkar yang melakukan pemecatan terhadap sejumlah kader dan salah satunya adalah Ketua DPD I Golkar Sulawesi Barat. Namun, pemecatan yang terjadi membawa dampak tidak baik terhadap kedua pengurus lembaga partai Golkar tersebut, dimana internal DPP sendiri sampai saat ini mengalami konflik berkepanjangan akibat dari pemecatan sejumlah kader dan berujung pada perpecahan kubu yang membentuk poros tersendiri terhadap dualisme kepemimpinan partai Golkar. Hal ini berdasarkan hasil Munas Ancol yang memenangkan Agung Laksono dan Aburizal Bakri sebagai pemenang Munas Bali. Sehingga, konflik internal partai Golkar pun semakin meluas dan merambat keberbagai wilayah seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat I dan II.

Ketika konflik kembali mencuat, Anwar yang diberhentikan dari jabatannya dan kemudian digantikan Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPD Golkar Sulbar. Anwar kembali mengklaim diri sebagai Ketua DPD Golkar kubu Agung Laksono dan tidak mengakui Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas DPD Golkar Sulbar.

Sementara, pihak kepengurusan Nurdin selaku kubu Aburizal Bakri menganggap bahwa kepengurusan Agung Laksono tidaklah sah secara konstitusional partai karena Munas Ancol bukanlah berdasarkan rekomendasi Munas sebelumnya yaitu hasil Munas Riau. Hal ini kemudian, memunculkan dualisme kepemimpinan didalam partai yang masing-masing mengklaim sah secara konstitusional.

Seperti dihimpun dalam salah satu media besar kota makassar; Berita Kota Makassar (BKM), bahwa tidak hanya ditingkat pusat pengurus Partai Golkar terpecah, tapi juga ditingkat daerah. Seperti

halnya di DPD Partai Golkar Sulbar. Jika Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) menunjuk Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas (Plt), maka Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono menunjuk Gubernur Sulbar, sebagai Plt Ketua DPD I Partai Golkar di Sulbar. Penunjukan Anwar sebagai Plt ketua berdasarkan surat keputusan DPP Partai Golkar bernomor 006/DPP/Golkar/1/2015 tertanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani Agung Laksono sebagai ketua umum dan Sekretaris Jendral, Zainuddin Amali. Tidak tanggung-tanggung, dalam surat keputusan tersebut tidak hanya menunjuk Anwar sebagai Plt, tetapi juga menyatakan mencabut surat keputusan penonaktifan Anwar sebagai ketua DPD Golkar Sulbar bernomor Kep-339/DPP/Golkar/2014 tertanggal 25 Agustus 2014.

Sementara itu, menanggapi kader yang ikut dalam pelaksanaan Munas Partai Golkar yang di gelar di Nusa Dua Provinsi Bali lalu, yang diikuti beberapa perwakilan pengurus DPD I dan DPD II Provinsi Sulawesi Barat, adalah hal baru dalam melihat dinamika internal pengurus Golkar Sulbar.

Kondisi demikian, seakan memperlihatkan perpecahan dikalangan pengurus Golkar Sulbar dengan Anwar selaku Ketua Partai. Namun, penonaktifan Anwar oleh Aburizal menjadi alasan ketidakhadirannya dalam Munas Bali dan memilih hadir dalam Munas tandingan (Agung Laksono) yang diselenggarakan Ancol Jakarta. Ini kemudian dianggap sebagai politik dua muka yang dilakukan pengurus daerah terhadap dualisme kepemimpinan Golkar. Hal itu dilakukan untuk menghindari efek konflik ke pengurus di daerah.

Konflik kelembagaan yang terjadi ditubuh Partai Golkar saat ini, seakan memberi isyarat bahwa munculnya faksi-faksi didalam partai karena lemahnya kesadaran elit-elit partai untuk berlembaga dengan baik, sehingga yang muncul adalah pengelompokan orang didalam partai yang berkompetisi untuk memperoleh keuntungan kekuasaan

442 didalam partai (Randal dan Svasand, 2002:20).

5) Penyebaran Arus Bawah Konflik

Seperti diketahui dalam penjelasan sebelumnya diatas, konflik kembali meluas manakala pemecatan Anwar mendapat penolakan keras dari kader Golkar di Sulbar. Penolakan tersebut, mengarah kepada Ketua DPP Golkar yang menempatkan Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas DPD Golkar Sulbar. Kehadiran Nurdin Halid di Sulbar memang menjadi alasan tersendiri bagi kader Golkar untuk melakukan penolakan, hal ini terjadi mengingat perjalanan karir Nurdin yang pernah menjabat salah satu institusi terbesar sepak bola di Indonesia. Nurdin dinilai gagal mengelola institusi tersebut, bahkan Nurdin yang menjabat sebagai koordinator pemenang GOLKAR wilayah Sulawesi dinilai sebagai penyebab kalahnya Partai Golkar dalam kontestasi Pemilihan Walikota Makassar 2014 kemarin. (Lihat dalam Skripsi Syinta Warachma :2014).

Sedangkan dalam kutipan wawancara sebelumnya, terkait aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan simpatisan yang mengatasnamakan Komite Aksi Kader Muda Penyelamat DPD Partai Golkar Sulawesi Barat berunjuk rasa menolak Nurdin Halid selaku pelaksana tugas ketua partai berlambang pohon beringin itu. Dalam aksinya, para demonstran menolak kedatangan Nurdin Halid di Sulbar, karena dianggap dapat mencederai sendi-sendi demokrasi ditubuh partai.

Sementara itu, dalam pernyataan yang berbeda, diakui Nurdin bahwa dirinya mendapatkan mandat dari ketua umum sebagai pelaksana tugas DPD Sulbar, mengingat dilakukannya pemberhentian terhadap pengurus lama. Sehingga, untuk sementara dirinya ditunjuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai telah dilaksanakannya Musdalub, dan dalam pernyataannya, Nurdin mengungkapkan kekesalannya terhadap Anwar karena menganggap ikut memprovokasi dirinya dengan menyuruh segelintir oknum

kader Golkar untuk melakukan aksi di Sulbar.

Berikut kutipan wawancara terhadap Pelaksana Tugas DPD I Golkar Sulbar bapak Nurdin Halid kepada; Tribun Timur, senin (18/8/2014).

"Pengunjuk rasa hanyalah segelintir oknum kader Golkar suruhan mantan Ketua DPD Golkar Sulbar, Anwar yang tidak paham organisasi. Harusnya segelintir oknum tersebut mendemo Anwar sontoloyo karena telah menghinai keputusan partai yang telah digunakan sebagai kendaraan politik," kata Nurdin kepada Tribun Timur, Senin (18/8/2014).

Setelah menerima mandat oleh DPP Golkar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua untuk melaksanakan konsolidasi dan penertiban dalam rangka mengawal perjuangan arah koalisi partai untuk mengkampanyekan pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014, maka Nurdin Halid pun melakukan langkah-langkah organisasi. Hal ini terlihat, ketika Nurdin bersama St. Muhyina Muin selaku ketua Harian Partai yang ditunjuk DPP Golkar, melakukan kampanye di Majene Profinsi Sulbar. Kehadiran Nurdin juga sekaligus ingin mempertegas penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sulbar. Di depan para kader dan wartawan Nurdin memperlihatkan SK penunjukan dirinya. (Diakses dari Makassar, Jaringnews.com, 27/7/2014).

Sementara, aksi menentang Nurdin Halid kian memanas karena memaksa pengurus Golkar setempat untuk menerima para demonstran. Setelah negosiasi, pengurus DPD Golkar Sulbar menerima demonstran untuk dilakukan dialog menindaklanjuti tuntutan simpatisan partai. Akhirnya, pengurus DPD Golkar ikut merespons atas aksi yang dilakukan angkatan muda Partai Golkar itu. Menurutnya, aspirasi para kader perlu disampaikan ke tingkat pusat, mengingat tuntutan para kader adalah bagian dari proses perjuangan untuk memperkuat Golkar di Sulbar.

Berikut kutipan wawancara terhadap Wakil Ketua DPD Golkar



Sulbar Thamrin Endeng, di mamuju:

"Aksi yang dilaksanakan kader Golkar kemarin, tetap kami apresiasi karena pada waktu itu kami belum menerima surat pemberhentian Anwar Adnan Saleh selaku ketua DPD Golkar Sulbar, sementara apa pun yang menjadi tuntutan kader maka hal itu akan diteruskan ke DPP. Persoalan yang terjadi di internal Golkar tetap diselesaikan sesuai mekanisme partai," tuturnya, (Wawancara dilakukan di mamuju Senin (5/8/2015).

Konflik pun merambat dalam internal pengurus partai, manakalah kehadiran Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas ketua tidak hanya mendapat penolakan dari para kader muda, akan tetapi beberapa pengurus DPD Golkar ikut meramaikan perpecahan didalam partai berlambang beringin itu. Tidak jelasnya pernyataan pengurus DPP di sejumlah media terhadap isu dikeluarkannya surat pemecatan Anwar menjadikan pengurus di daerah ikut terprovokasi. Karena isu pemecatan tersebut memancing emosi kader dan membuat image partai terganggu, sedang SK pemberhentian belum juga sampai ketangan pengurus di Sulbar.

Berikut wawancara penulis kepada Wakil Ketua Partai Golkar Sulbar Rakhmat Abdullah BR di Mamuju.

"kemarin kami nilai DPP ini mendua, jadi keadaan menjadi tidak jelas. Sedangkan SK itu, belum dikirimkan secara resmi kepada kami di DPD, sementara isu-isu pemecatan sudah berkembang, dari mulut ke mulut, hanya komentar di koran. Sekjen Golkar bilang di koran kalau SK itu sudah ada. Menurut kami, itu tidak cukup untuk membuat kami yakin. Ini organisasi besar, ada mekanisme organisasi dalam menjatuhkan sanksi kepada kader yang dianggap indisipliner," kata Rakhmat. (wawancara dilakukan di mamuju, jumat/8/5/2015).

Pernyataan diatas kemudian menjadi polemik dikalangan pengurus daerah karena menganggap pengurus DPP tidak konsisten dalam proses mekanisme pemecatan terhadap kader yang dugaan

melakukan pelanggaran konstitusi partai, tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada jajaran pengurus daerah atas kebenaran dugaan pelanggaran tersebut.

Sedangkan, sebagaimana diketahui dalam pembahasan sebelumnya dan berdasarkan faktual dilapangan, isu tersebut tidak sesuai dugaan yang dilontarkan pengurus pusat terkait dukungan Anwar kepada salah satu pasangan calon Presiden. Sementara itu, karena dianggap keliru dalam menanggapi isu tidak benar, dan simpang siur informasi adanya SK pemecatan tersebut, hal ini kemudian menjadi alasan internal pengurus DPD untuk melakukan rapat tertutup untuk membahas isu kebenaran pemecatan tersebut.

Rapat tertutup itu, kemudian dihadiri Anwar Adnan Saleh selaku Ketua Partai dan Sekretaris Partai Golkar Sulbar Hamzah Hapati Hasan serta Wakil Sekretaris H. Hamid. Dalam rapat tertutup itu, menghasilkan beberapa poin penting dalam menjawab isu kebenaran pemecatan tersebut yaitu, oleh pengurus DPP sudah menganulir SK penonaktifan tersebut dengan mengeluarkan SK pembatalan yang ditanda tangani Aburizal Bakri lewat pengakuan hasil komunikasi (telepon seluler) dengan Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutarjo di Jakarta. Kedua, pengurus meminta agar DPP Golkar memberikan penjelasan yang betul-betul bisa diyakini secara tertulis terkait SK penonaktifan dan SK pembatalannya kepada pengurus DPD, sehingga kondisi Golkar di Sulbar bisa kondusif dan tidak dalam keadaan bimbang. Ketiga, jika memang harus ada Plt, maka penetapannya harus melibatkan jajaran pengurus Golkar Sulbar, dan sesuai mekanisme partai Plt diangkat dari kalangan pengurus internal DPD itu sendiri, setidaknya Sekretaris partai.

Kondisi demikian diatas seakan memberikan peluang bagi pengurus partai di tingkat pusat untuk melakukan rekonsiliasi atas permasalahan yang terjadi dengan pengurus DPD I Golkar Sulbar. Hal ini perlu dilakukan mengingat kader didaerah sangat dibutuhkan dalam menopang elektabilitas partai. Mengingat

peranan kader menjadi salah satu kekuatan politik di dalam partai, karena dibutuhkan regenerasi figur yang potensial untuk meraih dukungan dan merupakan modal penting yang memberikan energi politik bagi Partai Golkar dalam berkontestasi dengan partai-partai politik lain menjelang Pilkada serentak di Sulbar.

PROSES MANAJEMEN KONFLIK INTERNAL GOLKAR MENJELANG PILKADA 2015

A. PROSES REKONSILIASI INTERNAL PARTAI GOLKAR

Adapun pola manajemen konflik yang dilakukan partai Golkar dalam menekan konflik tersebut, adalah dilakukannya rekonsiliasi atau Islah terhadap dualisme kepemimpinan partai yaitu, Islah kubu Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakri. Islah dilakukan untuk mendamaikan kedua kubu yang berkonflik, mengingat legitimasi kader dalam memperoleh rekomendasi partai sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada serentak. Sementara, rekonsiliasi sendiri menurut para ahli adalah menghilangkan potensi konflik dan menjalin hubungan yang lebih harmonis pada waktu yang mendatang (Whittaker, 1999:8).

Dilakukannya kesepakatan islah kepada kedua kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakri menjelang moment Pilkada serentak, memberikan angin segar kepada kader Golkar di daerah. Tercapainya kesepakatan tersebut berdasarkan keputusan yang diambil kedua belah pihak dalam rapat tertutup dikediaman Wapres Jusuf Kalla di Jakarta. Jusuf Kalla sendiri adalah politisi senior Golkar yang turut hadir dalam rapat tersebut, yang kemudian dianggap sebagai poros penengah bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan yang dianggap sebagai solusi untuk partai Golkar dalam ikut menyukseskan Pilkada serentak. Pertama, mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga dapat mengusung calon dalam Pilkada serentak. Kedua, setuju membentuk tim penjaringan bersama di daerah.

Ketiga, adapun calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati. Keempat, pendaftaran calon kepala daerah pada Juli 2015 merupakan usulan dari Partai Golkar yang diakui oleh KPU. (Lihat dalam *kompas.com*, jakarta 28/5/2015, diakses pada 7/8/2015).

Berdasarkan keempat poin kesepakatan diatas, dapat dipahami bahwa keputusan tersebut seakan menjadi poros untuk berdamai demi keikutsertaan Partai Golkar dalam menghadapi moment tertentu, yaitu Pilkada serentak. Disatu sisi kesepakatan tersebut memberi angin segar kepada kader didaerah untuk melakukan langkah-langkah politik untuk menghadapi Pilkada. Hal ini juga menguntungkan bagi pengurus DPD Golkar Sulbar di tengah konflik yang melanda internal pengurus, mengingat adanya penonaktifan Anwar Adnan Saleh selaku ketua Partai dan pemberian mandat Pelaksana Tugas (Plt) kepada Nurdin Halid oleh Aburizal Bakri selaku Ketua Umum versi Munas Bali.

Adanya kesepakatan tersebut, menjadi sebuah moment baik bagi pengurus partai Golkar Sulbar untuk melakukan langkah-langkah politik dalam mempersiapkan kader yang potensial. Langkah-langkah politik yang dimaksud adalah penjaringan kader Golkar yang dianggap mempunyai elektabilitas tinggi untuk ikut dalam kontestasi Pilkada. Mengenai adanya keuntungan terhadap dicapainya kesepakatan islah ditingkat pengurus pusat, juga diutarakan salah satu pengurus DPD I Golkar Sulbar dengan penulis melalui telepon seluler.

Berikut wawancara penulis kepada Kanda Rahman Zainuddin:
"Kami sangat menyambut baik dengan adanya Islah antara Pak Agung dan Pak Ical kemarin, karena tentunya ini akan berdampak positif terhadap kader didaerah yang akan mengikuti Pilkada. Seperti juga beberapa daerah kabupaten yang ikut Pilkada serentak di Sulbar, walaupun ada beberapa proses yang lama untuk menjaring kader dan mendapatkan rekomendasi kedua Pimpinan Partai, yang istilahnya "ber-

Islah" untuk menyambut Pilkada., katanya. (Wawancara dilakukan pada tanggal, 7/8/2015).

Lebih lanjut, Rahman mengatakan bahwa proses Islah yang dilakukan kedua pimpinan partai, juga mempengaruhi hubungan baik antara pengurus Golkar Sulbar dengan Pengurus Pimpinan Partai hasil Munas Ancol yang sebelumnya bersitegang. Hal ini ditandai dengan diberikannya rekomendasi partai kepada kader Golkar yang ikut dalam kontestasi Pilkada pada beberapa Kabupaten di Sulbar.

B. PENDEKATAN ARBITRASI

Menindak lanjuti uraian pembahasan diatas, ada beberapa poin penting yang perlu dipahami, bahwa dalam proses pendekatan manajemen konflik dengan melakukan rekonsiliasi atau Islah-nya pengurus partai Golkar yang ditengarahi oleh Wapres Jusuf Kalla juga sebagai politisi senior Partai Golkar. Kehadiran Jusuf Kalla sebagai pihak ketiga untuk poros penengah diantara pihak yang berkonflik Agung dan Ical menandakan bahwa pendekatan Arbitrase juga dilakukan dalam proses manajemen konflik di internal Golkar. Yang mana Arbitrase sendiri menurut Christopher A. Moore (2003) dalam Wirawan (2013:214), pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang imparsial (tidak memihak) dan netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik. Keluaran dari keputusan arbitrase bisa bersifat nasihat dan tidak mengikat atau bisa juga berupa keputusan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik.

D. TRANSFORMASI ELEMEN KONFLIK

Elemen konflik yang dimaksud didalam internal DPD Golkar adalah semua faktor dari konflik yang meliputi antara lain: penyebab konflik, manajemen konflik, kekuasaan yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dan sebagainya. Persepsi pihak yang

terlibat konflik mengenai elemen-elemen konflik ini berbeda sehingga konflik bisa berlangsung secara berkepanjangan. Elemen-elemen tersebut perlu ditransformasikan sehingga pihak yang terlibat konflik mempunyai persepsi yang sama atau paling tidak saling mendekati (Wirawan, 2013:210).

Sedangkan proses transformasi konflik di dalam Partai Golkar ditandai dengan dibuatnya kesepakatan bersama oleh kedua kubu yang bersitegang. Dilakukannya kesepakatan bersama untuk memberikan kesempatan kepada partai ikut dalam kontestasi Pilkada di beberapa kabupaten di Sulbar dan mengesampingkan sementara elemen-elemen konflik di dalam internal partai dengan mengutamakan persepsi yang sama dalam menyambut Pilkada september 2015 mendatang.

KONFLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REKRUTMEN POLITIK

A. KONFLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETERPILIHAN KADER DALAM PENGISIAN KONTESTASI PADA PILKADA MAMUJU

Dalam pembahasan kali ini, akan diuraikan proses rekrutmen politik melalui pendekatan identifikasi kader Partai Golkar menjelang Pilkada Mamuju Utara. Pendekatan identifikasi kader dalam melihat sepak terjang seseorang untuk dilakukan langkah-langkah pencalonan merupakan salah satu langkah yang dilakukan hampir setiap partai politik, mengingat perlunya rekam jejak kader yang baik dan potensial untuk dicalonkan pada setiap moment politik. Hal ini kemudian menjadi perhatian penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses rekrutmen politik yang dilakukan Partai Golkar pada pencalonan di Pilkada Mamuju Utara.

Lebih lanjut, agar dapat ikut berpartisipasi pada Pilkada serentak diseluruh daerah, maka dicapailah kesepakatan Islah kedua kubu yang berkonflik di Partai Golkar. Tercapainya kesepakatan untuk memberikan legitimasi bagi kader untuk ikut dalam kontestasi

450 Pemilukada. Namun, keputusan tersebut tidak semulus yang dialami oleh Abdullah Rasyid dan Marigun Rasyid selaku kader Golkar dalam melalui proses pengambilan rekomendasi Partai baik di tingkat DPD II Mamuju Utara dan DPD I Sulbar serta Kedua Pimpinan Partai Golkar di Pusat. Kondisi demikian terjadi, pada saat pasangan tersebut mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati dari Partai Golkar, tapi mendapat penolakan berkas dari KPU Mamuju Utara. Dugaan adanya pemalsuan rekomendasi Golkar pihak Agung Laksono menjadi alasan ditolaknya berkas tersebut sehingga KPU memberikan batas waktu perbaikan.

Sementara, kedua pasangan tersebut diatas telah mendapatkan rekomendasi dari kepengurusan Nurdin selaku Plt Ketua DPD Golkar dan Aburizal Bakri selaku Ketua Umum versi Munas Ancol. Diakui, dalam proses identifikasi elektabilitas kedua calon tersebut jauh dibawah rata-rata dibanding beberapa figur dan kader partai lainnya. Sehingga elektabilitas kedua kader Golkar tersebut menjadi alasan kurang mendapat restu dari Ketua DPD II Matra dan DPD I Sulbar serta di Pihak Agung sendiri. Sementara pihak pengurus Golkar sendiri mengidentifikasi figur diluar partai yang mempunyai elektabilitas tinggi untuk diusung pada Pilkada, sedangkan figur yang dimaksud adalah kader dari partai lain. Sehingga memaksa melakukan poros koalisi dengan Partai PDI-Perjuangan yang mencalonkan incumbent Bupati Yaumil BR juga selaku ketua Partai.

Sementara sistem rekrutmen dilakukan secara instan seperti ini, dengan penjarangan dari kalangan pejabat atau mantan Bupati dikarenakan ketua Golkar Mamuju Utara Yaumil BR adalah kakak kandung dari calon incumbent Agus Ambo Djiwa juga selaku ketua DPD I PDI-Perjuangan Sulawesi Barat. Sementara dipihak pengurus DPD sendiri, secara terang-terangan mendukung bahkan memberikan rekomendasi Partai Golkar kepada Agus Ambo Djiwa untuk maju kembali pada Pilkada Mamuju Utara. Hal ini pun

dibenarkan oleh Pak H. Damris selaku anggota DPRD Profinsi Sulbar yang juga maju bakal calon Wakil Bupati Mamuju dari Partai Golkar. (Lihat dalam MamujuPos.com/6/8/2015. Diakses pada tanggal 8/8/2015).

Berikut wawancara penulis melalui telepon seluler kepada Bapak H. Damris, selaku kader Partai Golkar:

Pada dasarnya Golkar tidak punya figur kader yang memungkinkan untuk maju dalam pilkada Mamuju Utara, terlepas dari figur Pak Yaumil sendiri yang juga ketua partai. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi dikarenakan pak yaumil adalah saudara dari incumbent Bupati. Sedangkan pak Anwar juga demikian punya kedekatan emosional dengan Pak Agus, dengan begitu untuk memuluskan perjalanan salah satu kader Golkar yang bakal ikut tersebut, saya kira dapat dipahami, tuturnya. (Wawancara dilakukan melalui telepon seluler, jam 21:00 Minggu, 26/7/2015).

Lebih lanjut, Pak Damris mengatakan bahwa dibentuknya poros koalisi antara partai Golkar dengan PDI-Perjuangan dan beberapa partai lainnya seperti Partai Hanura, PAN, PKS, dan Partai Nasdem untuk mendukung Agus Ambo Djiwa dan Muhammad Saal pada Pilkada Mamuju Utara adalah langkah yang terbaik, mengingat daerah tersebut tidak masuk dalam peta kekuatan Golkar untuk memenangkan Pilkada, melainkan basis itu dimiliki oleh PDI-Perjuangan dengan kekuatan yang bertumpuk pada bakal calon incumbent tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa implikasi dari proses terjadinya konflik di internal Golkar dengan keterpilihan kader dalam pengisian kontestasi Pilkada di Mamuju Utara, adalah terjadinya konflik yang berkepanjangan dengan dicapainya kesepakatan Islah untuk memberikan kesempatan bagi Kader Partai Golkar didaerah untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada.

Kondisi demikian, ternyata tidak memberikan langkah positif

452 yang dialami pada Pilkada Mamuju Utara. Hal ini terlihat dengan adanya salah satu kader yang memanfaatkan dualisme kepemimpinan didalam partai untuk mendapatkan rekomendasi salah satu Ketua Golkar Versi Nurdin Halid dan memalsukan rekomendasi dari Kubu Anwar (Agung Laksono). Hal demikian membuat pengurus daerah geram dengan salah satu kader sehingga pada proses pemilihan akhir didalam menentukan pilihan atas kandidat yang akan diusung oleh partai dengan memilih dari kalangan Public figur dibanding kader internal Golkar sendiri untuk ditempatkan dalam kontestasi Pilkada. Sedangkan dipihak pengurus daerah sendiri tidak merestui pencalonan salah satu kadernya, karena dianggap memiliki elektabilitas rendah dan mengharuskan untuk poros koalisi.

B. KONFLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETERPILIHAN KADER DALAM PENGISIAN KONTESTASI PADA PILKADA MAMUJU

Secara terpisah diuraikan pada pembahasan sebelumnya diatas, terkait proses keterpilihan kader Golkar untuk ikut dalam kontestasi menjelang Pilkada. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa konflik yang terjadi didalam internal DPD I Golkar Sulawesi Barat adalah bagian dari dinamika politik dalam menyikapi Pilpres kemarin dan berujung kepada pemecatan Anwar selaku ketua Golkar Sulbar.

Konflik pun kian berkembang dikala terjadinya dualisme kepemimpinan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Aburizal (Munas Bali) dan kepemimpinan Agung (Munas Ancol), akibatnya, konflik pun merambat ke pengurus DPD I Golkar Sulawesi Barat.

Akibatnya, konflik yang berkepanjangan hampir pasti Partai Golkar tidak bisa ikut pada Pilkada di Sulbar, seperti Pilkada Mamuju, Majene, Mamuju Utara, dan Mamuju Tengah. Konflik yang melibatkan pengurus Daerah dan Pengurus DPP Golkar yang ditengarahi Nurdin Halid tersebut sangat berdampak pada proses

penjaringan kader Golkar di Sulbar untuk ikut dalam kontestasi Pemilukada, dimana waktu yang relatif singkat untuk bisa melakukan sosialisasi terhadap figur yang dianggap bisa untuk ikut dalam kontestasi tersebut terancam gagal akibat konflik yang tak kunjung selesai.

Sementara dicapainya kesepakatan Islah untuk memberikan kesempatan bagi Kader Partai Golkar didaerah untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada belum sepenuhnya memberikan langkah positif bagi kader Golkar di Sulbar, mengingat selama proses terjadinya konflik membuat salah satu kader yang digadang-gadang bakal calon Bupati Mamuju sibuk membenahi permasalahan internal Partai Golkar di Sulbar. Hal ini dilakukan karena Ketua DPD telah dipecat dari jabatannya oleh Pimpinan Partai Versi Aburizal Bakri. Sehingga kesiapan kader untuk ikut dalam kontestasi Pilkada memang menjadi perhatian penuh oleh Partai untuk melakukan proses pencalonan, mengingat apakah kader tersebut mempunyai elektabilitas tinggi sehingga bisa dicalonkan. Hal demikian sulit untuk dilakukan ketika internal partai dirundung masalah konflik, seperti yang terjadi pada internal partai Golkar Sulbar yang pada awalnya mendorong beberapa kader yang punya potensial untuk maju pada Pilkada Mamuju. Beberapa kader yang diidentifikasi punya elektabilitas tinggi tersebut seperti Hamzah Hapati Hasan selaku Sekretaris Partai dan Sugianto yang juga Ketua DPRD Kabupaten Mamuju.

Kedua kader tersebut memang menjadi perhatian awal partai untuk mendorong pada Pilkada Mamuju, namun karena dinamika konflik yang begitu lama membuat kedua kader tersebut hilang pamor untuk ikut dalam kontestasi Pemilu. Sehingga proses yang diambil adalah proses penjaringan figur yang dianggap punya elektabilitas tinggi dan tidak tanggung-tanggung rekrutmen dari kalangan birokrasi menjadi pilihan utama Partai Golkar karena beberapa dari kalangan Birokrasi tersebut punya image baik di

454

masyarakat. Kalangan birokrasi tersebut tertuju pada Kepala Biro Umum Pemprov. Sulbar yaitu, figur Ahmad Affa kemudian dinilai punya kedekatan emosional dimasyarakat Mamuju. Selain itu, figur lainnya yang dianggap mampu adalah Wakil Bupati Mamuju bapak Bustamin Bausat. Kedua figur tersebut berasal dari kalangan birokrasi dengan rekam jejak kinerja yang baik dan digadang-gadang sebagai bakal calon yang akan diusung Partai Golkar pada Pilkada Mamuju.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem rekrutmen yang dilakukan Partai Golkar dalam pencalonan kandidat adalah dengan merekrut dari kalangan Birokrasi. Hal ini kemudian dibenarkan lewat komunikasi personal penulis dengan Bapak Anwar Husein selaku Anggota DPRD Mamuju juga pengurus Partai Golkar di Sulbar.

Berikut Wawancara Penulis dengan Bapak Anwar Husein dikediamannya Kelurahan Kalukku, lebbeng, 2/8/2015.

"Sebenarnya dulu kami menginginkan pencalonan Pak Hamzah pada Pilkada Mamuju, mengingat beliau adalah kader yang paling tinggi elektabilitasnya di Mamuju, namun semuanya berubah dengan disibukkannya beliau dengan konflik internal partai, dimana beliau juga adalah Sekretaris Partai Golkar Sulbar, sementara beliau dengan Pak Anwar juga mengarahkan dalam rapat partai untuk melakukan penjarangan figur guna memenangkan Pilkada. Dan dalam rapat kami melirik kedua figur yaitu, Pak Ahmad Affa dan Pak Bustamin, sehingga berjalannya waktu pilihan pun jatuh pada Pak Bustamin Bausat dan untuk memperkuat internal partai kami pasangkan kader dari Golkar yaitu Pak Damris yang juga anggota DPRD Provinsi, tuturnya. (Wawancara dilakukan di lebbeng, minggu, jam 22.00, 2/8/2015).

Dari pernyataan dan pembahasan sebelumnya diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi atas terjadinya konflik yang berkepanjangan memaksa salah satu kader potensial untuk

mengurungkan niatnya untuk maju dalam bursa pencalonan dikarenakan kesibukan dalam menengarahi dan menjaga efektifitas konflik yang semakin universal diinternal Golkar Sulbar. Sehingga proses pemilihan akhir terhadap kandidat yang diusung Partai Golkar tertuju kepada Pasangan Bustamin dan H. Damris. Selanjutnya, pasangan dari Partai Golkar tersebut diatas resmi didaftarkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju akhir Juli kemarin.

C. KETERPILIHAN KADER DALAM PENGISIAN KONTESTASI PADA PILKADA MAJENE DAN MAMUJU TENGAH

Sementara itu, proses penjaringan kader pun berlangsung di pilkada Majene. Dimana pengurus DPD II Golkar Kabupaten Majene bingung dalam menentukan kader yang akan diusung pada Pilkada. Hal ini dikarenakan, selain belum adanya titik terang penyelesaian konflik di internal Partai juga membuat pengurus sulit untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi internal dalam proses penjaringan kader yang dianggap bisa ikut dalam kontestasi Pilkada. Konflik yang tidak kunjung usai didalam internal Golkar menjadi alasan belum ditetapkannya arah kebijakan politik pada Pilkada yang akan berlangsung. Sehingga memaksa pengurus untuk menunggu legitimasi yang sah dari pengadilan tinggi jakarta. Kondisi demikian, seakan menjadi ancaman terhadap partai Golkar dalam mengikuti kontestasi Pilkada di Majene.

Seperti diketahui bahwa Pengurus partai Golkar di Sulbar mayoritas mengakui kepengurusan Anwar selaku Ketua DPD versi Agung Laksono, namun dalam menyikapi kepengurusan yang sah, oleh hasil wawancara penulis dengan pihak pengurus DPD mengakui bahwa tetap mengikuti hasil keputusan Pengadilan sehingga Partai Golkar bisa mengusung kadernya pada Pilkada di Sulbar.

Berikut wawancara dengan Kanda Rahman Zainuddin selaku Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi DPD Partai Golkar Sulawesi Barat:

" Pengurus sendiri mengakui dan mendukung kepengurusan Anwar, mengingat beliau adalah Kader terbaik Golkar di Sulbar saat ini dan dukungan dari kader lainnya pun terlihat pada aksi kemarin, namun tentunya mengingat Partai Golkar Sulbar kedepan, maka kami tetap mengikuti hasil keputusan pengadilan karena sampai saat ini belum ada kebijakan politik yang dilakukan Partai Golkar dalam menyambut Pilkada akibat konflik yang terjadi. (Wawancara dilakukan di sekretariat DPD I Golkar Sulawesi Barat Jln. Pattana Endeng Mamuju, Kamis 30 April 2015).

Sementara dalam proses identifikasi kader potensial diinternal Golkar sangat sulit dilakukan mengingat tendensi konflik yang begitu tinggi dikalangan kader yang ingin maju dalam Pilkada Majene. Tingginya ego masing-masing kader memaksa pengurus untuk melakukan penjaringan yang begitu ketat dengan melibatkan tim survei. Elektabilitas seorang kader sangat dibutuhkan untuk diusung dalam bursa bakal calon, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terlepas dari peranan Bupati Kalma Katta yang juga Ketua DPD II Golkar tidak ada kader yang bisa menyamai tingkat popularitasnya. Sehingga mekanisme rekrutmen pun terbuka untuk dari kalangan eksternal yang hasilnya tertuju pada seorang figur Fahmi Massiara yang juga wakil Bupati Majene. Mekanisme yang sama juga dilakukan sebelumnya dengan menggaet kandidat dari kalangan birokrasi, sehingga proses pemilihan akhir tertuju kepada Fahmi Massiara dan pencalonannya pun resmi didaftarkan pada KPU Majene dengan menggadeng beberapa partai lainnya untuk mencukupi persyaratan kursi parlemen.

Berdasarkan uraian diatas bahwa terjadinya konflik yang berkepanjangan di internal Partai Golkar berimplikasi terhadap keterpilihan kader yang memaksa pengurus partai melakukan rekrutmen politik dari kalangan birokrasi untuk dicalonkan pada Pilkada Mamuju dan Pilkada Majene. Sementara pada Pilkada Mamuju Tengah dibentuk poros koalisi dengan partai pengusung

bakal calon Bupati Aras Tammauni, mengingat daerah tersebut basis kekuatan Partai Demokrat pemenang Pemilu kemarin, sehingga menyulitkan pengurus untuk menjaring figur ditengah pasang surut konflik internal Partai Golkar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam hasil pembahasan sebelumnya, maka untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap tujuan penelitian ini, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan juga saran sebagai berikut:

1. Pro dan kontra terhadap poros koalisi yang dibangun ditingkat pengurus pusat dalam mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014 kemarin, yang kemudian berujung pada perpecahan kader dan pengurus serta berlangsungnya konflik yang berkepanjangan di DPP Partai Golkar. Hal tersebut juga kemudian mempengaruhi konflik di internal Partai Golkar Sulbar, yang mana terjadinya pemecatan sejumlah kader yang membelot dari instruksi Partai. Kemudian, pemecatan tersebut juga mengarah kepada Ketua DPD I Sulbar yaitu Anwar Adnan Saleh.
2. Menguaknya aksi demonstrasi para kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulbar dalam menyikapi isu pemecatan Anwar oleh Pengurus Pusat menjadi riuhnya suasana konflik di internal DPD I Golkar Sulbar. Menurutnya, pemecatan saudara Anwar dianggap cacat konstitusional karena tidak berdasarkan proses mekanisme pemecatan dalam partai. Dimana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tidak memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali atau konfirmasi terhadap kader yang dianggap melakukan pelanggaran partai.
3. Sementara kehadiran Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD I Golkar di Sulbar semakin memperpanas situasi

- konflik di tubuh internal partai, akibat mendapat penolakan dari kader di daerah yang dianggap dapat mencederai sendi-sendi demokrasi di internal pengurus DPD I Golkar Sulbar.
4. Konflik yang berkepanjangan berujung pada konflik di tingkat pengurus daerah dengan pengurus pusat. Dimana kepengurusan Nurdin sebagai Plt mendapat perlawanan dari kubu simpatisan Anwar, kemudian melibatkan beberapa kader dan pengurus DPD seperti Wakil Ketua Partai Golkar Sulbar Rakhmat Abdullah yang menganggap bahwa DPP secara sepihak melakukan pemecatan tanpa memperhatikan isu kebenaran pelanggaran yang dilakukan oleh kader, sedangkan pemecatan tersebut juga tidak melibatkan pengurus daerah yang dianggap lebih mengetahui kondisi kader di Sulbar.
 5. Konflik yang berkepanjangan menghasilkan dualisme kepemimpinan DPP Partai Golkar juga merambat ke pengurus DPD I Sulbar, yang mana Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) menunjuk Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas (Plt), maka Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono menunjuk Gubernur Sulbar, sebagai Plt Ketua DPD I Partai Golkar di Sulbar. Penunjukan Anwar sebagai Plt ketua berdasarkan surat keputusan DPP Partai Golkar bernomor 006/DPP/Golkar/1/2015 tertanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani Agung Laksono sebagai ketua umum dan Sekretaris Jendral, Zainuddin Amali. Tidak tanggung-tanggung, dalam surat keputusan tersebut tidak hanya menunjuk Anwar sebagai Plt, tetapi juga menyatakan mencabut surat keputusan penonaktifan Anwar sebagai ketua DPD Golkar Sulbar bernomor Kep-339/DPP/Golkar/2014 tertanggal 25 Agustus 2014.
 6. Sementara itu, adapun pola manajemen konflik yang dilakukan partai Golkar dalam menekan konflik tersebut, adalah dilakukannya rekonsiliasi atau Islah terhadap dualisme

kepemimpinan partai yaitu, Islah kubu Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakri. Islah dilakukan untuk mendamaikan kedua kubu yang berkonflik, mengingat legitimasi kader dalam memperoleh rekomendasi partai sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada serentak.

7. Sedangkan, dicapainya kesepakatan Islah belum sepenuhnya memberikan langkah mudah bagi kader didaerah untuk mendapatkan rekomendasi partai. Hal ini terlihat dengan adanya salah satu kader yang memaksa melakukan pemalsuan tanda tangan atau rekomendasi dari salah satu Pimpinan Partai.
8. Diakui, perpecahan yang terjadi di internal Golkar Sulbar berimplikasi kepada elektabilitas kader dikarenakan kesibukan dalam menengarahi konflik Golkar, sehingga di beberapa daerah kabupaten memaksa pengurus melakukan penjaringan figur untuk memenangkan Pilkada. Bahkan tidak tanggung-tanggung memaksa Partai Golkar berkoalisi pada partai pengusung bakal Calon di salah satu kabupaten di Sulbar.

Adapun saran dalam jurnal ini antara lain :

1. Ditengah konflik yang berkepanjangan dibutuhkan kesadaran elit-elit dalam partai untuk melakukan rekonsiliasi yang utuh guna menyudahi perpecahan dan perbedaan yang tak kunjung selesai, sehingga kondisi demikian dapat menjaga keberlangsungan partai kedepan.
2. Sebaiknya dalam proses pengambilan keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terhadap pemecatan sejumlah kader yang dianggap melakukan pelanggaran, lebih mengutamakan asas demokrasi dengan melibatkan stakeholder yang punya wewenang dalam melihat kader tersebut, sehingga tidak terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambil.
3. Lebih lanjut, bahwa setiap perbedaan-perbedaan yang muncul dalam partai sebaiknya diarahkan pada konsensus demi kebaikan

bersama. Sehubungan dengan itu, maka tantangan yang harus dihadapi partai dan eli-elitnya adalah mengusahakan agar konflik yang muncul tidak mengarah kepada perpecahan di dalam tubuh partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel dan E Bingham Powell. (1966). *Comparatif Politics: A Development Approach*, Feffer & Simons Privated Bombay.
- Amal, Ichlasul. (2012). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (edisi revisi). Jakarta : PT. Gramedia
- Fajar A. M., (2013). *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (edisi revisi). Malang, Jatim : Penerbit Setara Press.
- Firmansyah, (2011). *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Potioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Geddes, Barbara, (1996). *Politicians Dilema: Building State Capacity In Latin America*, University Of California Press.
- Hardjana, A. M., (1994). *Konflik Di Tempat Kerja*. Yogyakarta : Kanisius
- Huntington, Samuel P., (2004). *Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Lili Romli, et al., (2008). *Kerangka Penguatan Partai Politik Di Indonesia*, PUSKAPOL FISIP UI, Jakarta.
- Lofland, John dan Lin H. Lofland, (1994). *Analizing social Settings : A Guide To Qualitative Observatioan and Analizing*, Belmont Compani. (Terjemahan)
- Pruitt, G., Dean dan Rubin Z., Jeffrey, (2011). *Teori Konflik Sosial*, (Cetakan ketiga). Diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Surbakti Ramlan, (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Suharsimi Arikuntoin, (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Syafie. Inu Kencana, Drs., H., M.Si., Dkk. (2002). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Tanjung, Akbar. (2007). *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Tomsa, Dirk. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia : Golkar in The Post- Soeharto Era*, Routledge, London and Newyork.
- Wahyudi, (2011). *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, (Cetakan Keempat). Bandung : Alfabeta.

Wirawan, (2010). Konflik dan Manajemen Konflik Teori Aplikasi dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.

Whittaker, David J., (1999). Conflict and Reconciliation in the Contemporary World. Routledge

Yadiman et al., (2013). Konflik Social dan Anarkisme. Yogyakarta : Penerbit ANDI

Jurnal

Abdullah Kaunar, 2011. Pusaran Politik Dalam Rekrutmen Kandidat Partai Golkar : (Studi Kasus Tentang Rekrutmen Kandidat Oleh Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2010-2015).

Deny Rendra dan Hendra Suryadi, Dinamika Pergeseran Kekuasaan Politik di DPD Partai Demokrat Propinsi Riau. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 10, No. 2, Desember 2012, Halaman 67-147.

Fattah. Abdul, Konflik Pasca Pilkada : Studi Kasus Depok. Jurnal Poelitik Vol. 1, No. 1, 2008.

Misrina, Metamorfosis Faksionalisme Internal Partai Golkar di Maluku Utara pada Pilkada Tahun 2007. Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2010.

Rasid Pora, 2014. Konflik Elit Kontestan Kekuasaan Internal Partai Politik : (Studi Kasus DPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara tahun 2013).

Warahma. Shinta, 2014. "Konflik Internal Partai Golkar Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013".

Website/Internet.

<http://makassar.antaranews.com>.

<http://www.jaringnews.com>.

<http://pemilu.metrotvnews.com>.

<http://kpu-sulbarprov.go.id>.

<http://JPNN.com>.

<http://Kompas.com.Jakarta>

<http://BeritaKotaMakassar.com>.

<http://Tribuntimur.com>.

<http://tempo.co.id>